



Implementasi Kebijakan E-Government dalam Administrasi Kepegawaian

M Harry Mulya Zein^{1*}, Diskha Febriyan Prasutra², Sisca Septiani³

^{1,2}Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

³Universitas Negeri Semarang, Indonesia

harry.zein@ipdn.ac.id^{1*}

Alamat: Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: harry.zein@ipdn.ac.id

Abstract. *The implementation of E-Government policies in personnel administration aims to improve the efficiency and transparency of public services. This research analyzes the implementation of related policies, obstacles faced, and solutions taken. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach, where data is obtained through observation, interviews, and documentation. The results show that although the implementation of E-Government is going well, there are still obstacles, such as the lack of experts and adequate infrastructure. Efforts made include recruitment of experts and updating technological infrastructure. In conclusion, improving the implementation of E-Government needs to be done by paying attention to the existing supporting factors.*

Keywords: *E-Government, Policy, Personnel Administration, Implementation, Efficiency*

Abstrak. Implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan terkait, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang diambil. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi E-Government berjalan baik, masih terdapat kendala seperti kurangnya tenaga ahli dan sarana prasarana yang memadai. Upaya yang dilakukan termasuk rekrutmen tenaga ahli dan pemutakhiran infrastruktur teknologi. Kesimpulannya, peningkatan implementasi E-Government perlu terus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung yang ada.

Kata kunci: *E-Government, Kebijakan, Administrasi Kepegawaian, Implementasi, Efisiensi*

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan ini adalah penerapan E-Government, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pelayanan pemerintahan. E-Government memungkinkan integrasi teknologi dalam proses administrasi dan pelayanan publik, sehingga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong penerapan E-Government di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan E-Government secara menyeluruh di setiap unit kerja.

Implementasi E-Government tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan kebijakan E-Government, khususnya di lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam administrasi kepegawaian. Implementasi kebijakan E-Government dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang mencakup tiga dimensi utama: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Teori ini menekankan pentingnya struktur organisasi, interpretasi kebijakan oleh pelaksana, dan penerapan kebijakan dalam konteks operasional. Pemahaman yang mendalam terhadap ketiga dimensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dan merumuskan solusi yang tepat.

E-Government yang telah diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan realitas di lapangan. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki basis keilmuan yang sesuai, serta sarana dan prasarana yang belum optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan E-Government. Mengatasi masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan E-Government di salah satu lembaga kepegawaian, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-Government.

Implementasi kebijakan e-government dalam administrasi kepegawaian merupakan suatu langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. E-government, yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik, telah menjadi fokus utama dalam reformasi administrasi pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keberhasilan kritis yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Salah satu penelitian yang relevan yang mengidentifikasi faktor-faktor sukses dalam implementasi e-government, seperti dukungan dari manajemen puncak, pelatihan bagi pegawai, serta infrastruktur teknologi yang memadai (Napitupulu, 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada aspek manusia dan organisasi. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang beradaptasi dengan menggunakan sistem informasi administrasi, yang menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas dalam implementasi kebijakan (Rifani, 2022). Lebih lanjut, menekankan bahwa kebijakan publik, termasuk e-government, harus memiliki dasar yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sauri, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus melibatkan komunikasi yang efektif, sumber daya yang cukup, serta disposisi dari pelaksana kebijakan (Nurmalita, 2022).

Selain itu, faktor lingkungan politik dan sosial juga berperan penting dalam implementasi kebijakan e-government. mencatat bahwa interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Rahman, 2021). Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi e-government yang efektif. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan (Wulansari & Prabawati, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan E-Government diimplementasikan dalam administrasi kepegawaian, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual penerapan E-Government dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

E-Government

E-Government merupakan konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. E-Government bertujuan untuk mengatasi ketidakefisienan yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan tradisional yang berbasis kertas, serta untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Fachrizal et al., 2023; Fahlevy et al., 2023; Septiani et al., 2022).

Definisi E-Government dapat bervariasi, namun secara umum, mencakup penggunaan TIK untuk memberikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, bisnis, dan karyawan. Menurut World Bank, E-Government adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah (Slamet, 2013; Syuaib, 2023). Dalam konteks Indonesia, E-Government diatur oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan TIK dalam pengembangan pelayanan publik (Purba et al., 2022; Farida, 2020).

Implementasi E-Government diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk dalam upaya untuk membangun good governance, di mana prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting (Alfayn, 2022; Irawan & Hidayat, 2021). Dengan E-Government, diharapkan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, serta dapat diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil (Atmajaya & Wirata, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan E-Government antara lain adalah infrastruktur teknologi yang memadai, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan dari kebijakan pemerintah (Musfekar, 2018; Pamungkas et al., 2020). Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap sistem E-Government juga menjadi kunci dalam adopsi dan penggunaan layanan ini (Sudarsono & Lestari, 2018; Ahmad et al., 2022).

Secara keseluruhan, E-Government merupakan langkah penting dalam modernisasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan TIK, diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari warga dalam proses pemerintahan (Pratama & Hendini, 2019; Pratiwi, 2020).

Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks ini, administrasi kepegawaian tidak hanya berfokus pada pengelolaan data pegawai, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pegawai. Hal ini mencakup pengelolaan informasi pegawai, pengolahan data, serta prosedur yang berkaitan dengan sumber daya manusia (Maksin, 2023; Rimayanda, 2022; Lestari & Susanti, 2021).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menjadi salah satu alat penting dalam administrasi kepegawaian (Karina et al., 2022; Hermawan et al., 2023). Dengan adanya

sistem ini, organisasi dapat melakukan pengolahan data secara lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (Maknuni., 2022; FAKHRUDDIN, 2023).

Selain itu, kompetensi tenaga administrasi juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas administrasi kepegawaian (Carolina & Rusdinal, 2023; Nuraini et al., 2023). Mengoptimalkan kinerja pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja, yang merupakan indikator penting dalam keberhasilan administrasi kepegawaian (Anggreani, 2023).

Dalam praktiknya, administrasi kepegawaian juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Pamungkas, 2024; Wegie, 2023). Dengan demikian, administrasi kepegawaian yang baik akan mencakup pengelolaan yang sistematis, penggunaan teknologi informasi yang tepat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi kepegawaian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara langsung dengan berbagai informan kunci yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan E-Government. Informan dipilih secara purposive sampling, dengan pertimbangan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.
- b. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana kebijakan E-Government diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di lembaga kepegawaian. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap penggunaan teknologi, interaksi antara pegawai, serta kendala yang mungkin muncul dalam operasional sehari-hari.

- c. Dokumentasi: Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan, kebijakan, laporan, serta dokumen lain yang terkait dengan implementasi E-Government. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai latar belakang, proses, dan hasil implementasi kebijakan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

- a. Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala dinas, pegawai yang terlibat langsung dalam implementasi E-Government, serta staf teknis yang bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik.
- b. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan publikasi terkait implementasi E-Government. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas temuan yang diperoleh dari data primer.

Analisi Data

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan metode analisis data kualitatif.

Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

- a. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan direduksi atau disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis.
- b. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data membantu peneliti untuk melihat pola dan hubungan antara berbagai aspek yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan: Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Kesimpulan ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana kebijakan E-Government diimplementasikan, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan

komprehensif mengenai implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi kepegawaian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi kepegawaian. Hasil utama yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Implementasi E-Government: Implementasi kebijakan E-Government di lembaga kepegawaian telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar aplikasi dan sistem yang dikembangkan telah digunakan dalam proses administrasi, tetapi integrasi antar-sistem masih belum sempurna.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM): Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi merupakan salah satu hambatan utama. Dari total pegawai, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk mendukung implementasi E-Government.
- c. Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga kepegawaian cukup memadai, namun masih memerlukan pemutakhiran untuk mendukung implementasi E-Government secara penuh. Beberapa peralatan teknologi dan infrastruktur jaringan masih menggunakan versi yang sudah usang.
- d. Kendala Teknis: Kendala teknis yang dihadapi termasuk seringnya terjadi gangguan server dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Hal ini mengakibatkan terganggunya layanan berbasis elektronik yang diberikan kepada pegawai dan masyarakat.

Tabel berikut menyajikan data terkait tingkat implementasi dan jumlah SDM yang mendukung:

Tabel 1. Tingkat Implementasi E-Government dan Jumlah SDM yang Mendukung

Aspek	Persentase Implementasi (%)	Jumlah SDM Ahli (Orang)
Sistem Absensi Elektronik	85%	10
Sistem Pengelolaan Data Pegawai	78%	7
Sistem Evaluasi Kinerja	65%	5
Sistem Mutasi dan Promosi	60%	3

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, menafsirkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi, serta mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Government di lembaga kepegawaian sudah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang memiliki keahlian teknologi informasi dan keterbatasan sarana prasarana yang sudah usang. Masalah ini perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi E-Government sangat bergantung pada kesiapan SDM dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Keterbatasan di kedua aspek ini menyebabkan lambatnya proses integrasi sistem dan berkurangnya efektivitas layanan. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan server juga menghambat kelancaran pelayanan, yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan layanan e-government adalah kurangnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasi pemerintah (Sa'adah, 2020). Demikian pula, kurangnya infrastruktur TIK yang kuat telah diidentifikasi sebagai penghalang implementasi e-government yang efektif (Gusman & Nurmalina, 2023; Winarni, 2023). Selain itu, kesenjangan kesiapan teknologi di berbagai daerah memperburuk tantangan ini, yang menyebabkan pemberian layanan yang tidak konsisten di berbagai tingkat pemerintahan (Widiyanti, 2023; Eko et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam proses e-government dapat meningkatkan pemberian layanan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah (Rahman, 2023; Supratiwi et al., 2019). Namun, banyak platform e-government yang gagal memfasilitasi interaksi (Prikhno et al., 2021; Wijaya, 2023).

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah juga merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan inisiatif e-government (Sulanjari, 2020; Yulianto & Suripto, 2018). Selain itu, kurangnya kerangka kerja strategis yang jelas untuk implementasi e-government sering kali mengakibatkan upaya yang terfragmentasi yang tidak selaras dengan tujuan tata kelola pemerintahan yang lebih luas (Utama, 2020; Aminah & Saksono, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, yang menekankan pentingnya kesiapan organisasi, interpretasi kebijakan oleh pelaksana, dan penerapan kebijakan dalam konteks operasional. Dalam konteks E-Government, kesiapan SDM dan infrastruktur merupakan aspek organisasi yang sangat penting. Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi antar-sistem dalam E-Government memerlukan dukungan teknis

yang kuat dan komitmen dari pimpinan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Berdasarkan temuan ini, dapat disarankan bahwa teori implementasi kebijakan perlu menekankan lebih banyak pada pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi E-Government. Selain itu, perlu ditambahkan bahwa kebijakan E-Government memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada aspek manajemen perubahan dan peningkatan kompetensi SDM.

Implementasi E-Government dalam administrasi kepegawaian memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan organisasi, khususnya dalam hal SDM dan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM dan pemutakhiran sarana prasarana menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan implementasi E-Government di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi E-Government dalam administrasi kepegawaian telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang teknologi informasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar lembaga kepegawaian segera melakukan rekrutmen tenaga ahli, pemutakhiran infrastruktur, serta pelatihan intensif bagi pegawai. Saran ini ditujukan kepada manajemen lembaga kepegawaian untuk memperkuat kesiapan internal dan memastikan kelancaran operasional E-Government, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Z., Alfayn, M., & Istiqoh, A. (2022). Analisis Upaya Strategis Dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1432. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2143>
- Alfayn, M. (2022). From E-Government To Good Governance: Examining The Impact Of Digitalization On Public Service Delivery In Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19-40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Aminah, S. and Saksono, H. (2021). Digital Transformation Of The Government: A Case Study In Indonesia. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272-288. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2021-3702-17>

- Anggreani, I. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Simpeg Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pematang. *Jurnal Economina*, 2(11), 3188-3202. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i11.809>
- Atmajaya, D. and Wirata, G. (2021). Peranan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. *Widyanata*, 18(1), 1-11. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.529>
- Carolina, D. and Rusdinal, R. (2023). Persepsi Guru Terhadap Kompetensi Teknis Tenaga Administrasi Sekolah Berbasis Digital Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Padang Panjang. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 8-14. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.87>
- Eko, E., Pujani, V., & Lukito, H. (2022). Factors Affecting Implementation E-Government In The Government Of West Sumatra Province (Study On West Sumatra Provincial Government Employees). *Journal of Business Studies and Management Review*, 6(1), 70-78. <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v6i1.21130>
- Fachrizal, M., Wibawa, J., Fauzan, R., & Radliya, N. (2023). Aplikasi Pendukung Pelayanan Publik Berbasis Mobile Dalam Mendukung Penerapan E-Government Pada Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. *Majalah Ilmiah Unikom*, 21(1), 21-28. <https://doi.org/10.34010/miu.v21i1.10686>
- Fahlevy, M., Saleh, M., & Nurmiyati, N. (2023). Eksistensi Birokrasi Di Era Revolusi 4.0: Penggunaan Electronic Government Dalam Optimalisasi Pelayanan. *Journal of Government Science (Govsci) Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 42-57. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.45>
- Fakhrudin, E. (2023). Efektivitas Penerapan Siasn Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*, 17(4), 1430. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.626>
- Farida, F. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota) Se-Papua Berbasis Laman. *Abis Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59253>
- Gusman, D. and Nurmalina, N. (2023). Gap analysis of E-Government Implementation in Indonesia. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(1), 209-215. <https://doi.org/10.31004/jutin.v6i1.13483>
- Hermawan, K., Pusparani, I., & Solihudin, D. (2023). Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Studi Kasus Kebijakan Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan (Sampean). *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.13-26>
- Irawan, B. and Hidayat, M. (2021). Asistensi Pembuatan Website “Mall Pelayanan Publik” Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.7766>

- Karina, K., Ibrahim, T., & Dian, D. (2022). Hubungan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dengan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian. *J-Mpi (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 7(2), 88-101. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v7i2.14072>
- Lestari, L. and Susanti, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan Rs Dr Soetomo*, 7(2), 284. <https://doi.org/10.29241/jmk.v7i2.643>
- Maknuni, J. (2022). Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis IT di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 54-58. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i2.54>
- Maksin, M. (2023). Evaluasi Program Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Bidang Industri Melalui Rencana Strategi Dalam Efisiensi Administrasi Kepegawaian Kota Probolinggo. *Jurnal Publik*, 17(02), 126-140. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.264>
- Musfikar, R. (2018). Kendala dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Cyberspace Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.22373/cs.v2i1.2746>
- Napitupulu, D. (2015). Studi Validitas Dan Realibilitas Faktor Sukses Implementasi E-Government Berdasarkan Pendekatan Kappa. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 71. <https://doi.org/10.21609/jsi.v10i2.388>
- Nuraini, N., Afriza, A., & Andriani, T. (2023). Pembinaan Kompetensi Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 489-499. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1488>
- Nurmalita, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. *Publika*, 1111-1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>
- Pamungkas, A., Nugroho, L., & Sulisty, S. (2020). Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur. *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 3(3), 143-152. <https://doi.org/10.33387/jiko.v3i3.2176>
- Pamungkas, P. (2024). Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus Pt. Hara Sentosa Mandiri. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 177-186. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1129>
- Pratama, E. and Hendini, A. (2019). Pemodelan Sistem Informasi Layanan Masyarakat (Silam) Pada Kantor Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan. *Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.20527/klik.v6i1.178>
- Pratiwi, P. (2020). Menuju Pemerintahan Elektronik Yang Transformatif Pratiwi. *Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.689>
- Prikhno, I., Kuksa, V., & Mihaylov, I. (2021). The Use Of Information Technology In Financial

- Management. SHS Web of Conferences, 100, 01007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001007>
- Purba, D., Simamora, M., & Gulo, P. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Sepp) Pada Dinas Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara. *Ulead Jurnal E-Pengabdian*, 48-52. <https://doi.org/10.54367/ulead.v1i2.1679>
- Rahman, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), 55-68. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1819>
- Rahman, M. (2023). The Implementation Of E-Governance Initiatives Plays A Crucial Role In Ensuring The Realization Of A Digital Bangladesh. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 3(2), 58-66. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v3i2.278>
- Rifani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. *Publika*, 1373-1386. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1373-1386>
- S, F., Anwar, H., & Suparman, N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi Simakci Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 72-83. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.73>
- Sa'adah, N. (2020). The implementation of e-procurement in Indonesia: benefits, risks, and problems. *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(2), 283-304. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304>
- Sauri, S. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1316-1326. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5483>
- Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A., Resti, A., Fazira, V., Wijaya, D. & Aldeo, Z. (2022). Peranan E-government dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(5), 302. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183>
- Slamet, S. (2013). Manajemen Strategik Sebagai Pendekatan Dalam Mengembangkan e-Government di Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 110-118.. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2283>
- Sudarsono, B. and Lestari, S. (2018). Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government. *Komik (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 2(1). <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.981>
- Sulanjari, D. (2020). E-government Implementation in The Education Zone Service in Makassar City. *Jurnal Ad Ministrare*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.26858/ja.v6i2.12430>
- Supratiwi, W. and Octorizki, F. (2019). The Role Of Good Government Governance on The Influence of E-Government Implementation Toward Local Government Performance.

Kne Social Sciences, 3(11), 540. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4033>

- Suripto, S., & Supriyanto, S. (2018). Employees' Performance Before and After E-Government Implementation: A Case Study of The Local Board for Finance And Asset Management in Tanggamus Regency of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 5(77). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-05.03>
- Syuaib, M. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Parepare Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Journal Softw. Eng. Multimedia*, 1(2), 67-75. <https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1343>
- Utama, A. (2020). The Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 190-196. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Wegie, S. (2023). Sistem Informasi Kepegawaian untuk Perusahaan Pembangkit Listrik Menggunakan Model Rapid Application Development. *J. of Information System and Application Development*, 1(2), 121-131. <https://doi.org/10.26905/jisad.v1i2.11074>
- Widiyanti, C. (2023). Analysis of E-Government Implementation In Public Services: Study on Personnel Agency and Human Resource Development in Banyumas Regency. *Gema Wiralodra*, 14(2), 724-729. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i2.388>
- Wijaya, J. (2023). E-government in Indonesia: Policy Review and Implementation of Jokowi's Government. *The Journalish Social and Government*, 4(3), 302-309. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.563>
- Winarni, D. (2023). Analysis of the Level of E-Government Implementation and Factors that Influence it (Empirical Study of Regional Government in Central Java). *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 252-266. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.3.237-251>
- Wulansari, Y. and Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 307-320. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>